

DAFTAR PUSTAKA

1. Literatur :

Abdullah. 2010. *MA Judex juris ataukah Judex Factie, Pengkajian Asas, Teori, Norma dan Praktik*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI.

Ali. Achmad. 2012. *Menengok Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana.

Apeldoorn. Van,. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

Ahmad. Makshum,. 2009. *Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman*. Yogyakarta: Total Media.

Ashofa. Burhan,. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Asshiddiqie. Jimly,. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Astawa I Gede Pantja dan Suprin Na'a. 2012. *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*. Bandung: Refika Aditama.

Arto. A. Mukti,. 2001. *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Arto. H. A. Mukti,. 2008. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Atmasasmita Romli, *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta. Fikahati Aneska.

Black. Henry Campbell,. 1990. *Black'S Law Dictionary*. West Publishing.

Chazawi. Adami,. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bag. I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Diantha. I Made Pesek,. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.

- F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib. 2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, Philipus M, dkk. 2011. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Cet. II. Yogyakarta: UGM Pers.
- HD. Stout,. 2004. *De Betekenissen Van De Wet*. Dalam Irfan Fachruddin. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni.
- HR. Ridwan,. 2006. *Hukum Adminitrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Hamzah. Andi,. 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: CV.Sapta Artha Jaya.
- Harahap. M. Yahya,. 2013. *Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap. M. Yahya,. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap. M. Yahya 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang pengadilan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*. Jakarta. Sinar Grafika
- Harahap M. Yahya, 2007. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Edisi Kedua. Sinar Grafika. Jakarta, hlm. 348.
- Kansil dan Christine S.T. Kansil. 2011. *Pengantar Ilmu hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kansil. C. S. T,. 2008. *Hukum Tata Negara RI*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kamil. Ahmad,. 2012. *filasafat Kebebasan Hakim*. Jakarta: Kencana Prenada Pratama.
- Lamintang. P.A.F,. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cet. 2. Bandung: Sinar Grafika.
- Muchsin. 2004. *Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi*. STIH IBLAM.

- M. Hadjon. Philipus,. et. al. 2008. *Pengantar Hukum Adminstrasi Negara*. Jogjakarta: UGM Pers.
- Manan. Abdul. 2003. *Penerapan Hukum Acara Perdata dilingkungan Peradilan Agama*. Jakarta : Kencana
- Marzuki. Peter Mahmud,. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: PT. Rhineka Cipta.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2006. *Pedoman Perilaku Hakim (code of Conduct)*, Kode etik Hakim. Jakarta: Pusdiklat MA RI.
- Nirwanto. D. Andhi,. 2013. *Otonomi Daerah Versus Desentralisasi Korupsi*, Semarang: Aneka Ilmu.
- Prodjodikoro. Wirjono,. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Pompe. Sebastian,. 2012. *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*. Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan.
- Rifa'i. Ahmad,. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rommelink. Jan,. 2003. *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitan Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sidharta. Arief,. 2013. *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Cet. Ke-4, Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Afabet.
- Sudarto. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sugeng. Bambang,. 2012. *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sarwono. 2012. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. Rawamangun: Sinar Grafika.

- Titraadmijaja. Mr. M.H., 2005. *Kedudukan Hakim dan djaksa dan Atjara Pemeriksaan Perkara-Perkara Pidana dan Perdata*. Edisi revisi Jakarta: Vasco.
- Thalib. Abdul Rasyid,. 2006. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam SisitemKetatanegaraan Republik Indonesi*. Bandung: Citra aditya Bakti.
- Tirtaamidjaja. MH,. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: Vasco.
- Ujan. Andre Atta,. 2009. *Filsafat Hukum, Membangun Hukum, Membela Keadilan*. Yogyakarta: Pustaka Filsafat Kanisius.
- Utrech. E 2003. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Edisi Revisi. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, hlm. 360.
- Wahyudi. Abdullah Tri,. 2004. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahyudi. Abdullah Tri,. 2018. *Hukum Acara Peradilan Agama Dilengkapi Contoh Surat-surat Dalam Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Yuwono. Susilo,. 1982. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHP (Sistem dan Prosedur)*. Bandung: Alumni.

2. Peraturan Perundang-Undangan :

- Pemerintah Indonesia. 1981. *Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara RI Tahun 1981, No. 76. Sekretariat Negara. Jakarta
- Pemerintah Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No.157. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2009. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung*. Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2009, No.4958. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2006. *Pedoman Perilaku Hakim (code of Conduct)*, Kode etik Hakim. Jakarta: Pusdiklat MA RI.

3. Putusan :

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, No. 1616 K/Pid.Sus/2013 tanggal 20 November 2013, tentang Perkara Tindak Pidana Korupsi, dengan Terdakwa Anggelina Patricia Pinkan Sondakh.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, No. 1261 K/Pid.Sus/2015 tanggal 8 Juni 2015, tentang Perkara Tindak Pidana Korupsi, dengan Terdakwa Anas Urbaningrum.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, No. 574 K/Pid.Sus/2018 tanggal 26 September 2018, tentang Perkara Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan Terdakwa Baiq Nuril Maknun.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI, No. 2419 K/Pid.Sus/2018 tanggal 8 Juni 2015, tentang Perkara Tindak Pidana Narkotika, dengan Terdakwa Hwei Liang alias Toni alias Hartoni Jaya Buana.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung, No. 433K/Pid.Sus/2018 tanggal 2 Mei 2018, tentang Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan Terdakwa Hj. Nuraidah alias Hudriah binti Kamaruddin.

Putusan Mahkamah Konstitusi, No. 69/PUU-X/2012 tentang Uji Materiil Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

4. Sumber Lain :

Jurnal :

Adonara. Firman Floranta,. *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi Principles of Freedom of Justice in Decidene The Case as a Constitutional Mandate*. Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, Fakultas Hukum Universitas Jember.

Angkouw. Kevin,. *Fungsi Mahkamah Agung sebagai Pengawas Internal dan Tugas Hakim dalam Proses Peradilan*. Journal Lex Administratum. Vol. II/No.2/Apr-Jun/2014.

Priska. Eyreine Tirza,. 2013. *Kajian Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat Dan Pengawasan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”.*Lex et Societatis*. Jurnal Hukum, Universitas Lampung, Vol.1. No.2.

Syafrudin. Ateng,. 2000. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*. Jurnal Pro Justisia Edisi IV. Bandung: Universitas Parahyangan.

Seytanegara. Ery,. *Kebebasan Hakim Memutus Perkara dalam Konteks Pancasila (Ditinjau dari Keadilan Substantif)*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-44 No.4 Oktober-Desember 2013.

Internet :

Baranews.com/blog/2018/01/02/lembaga-peradilan-meluruskan-kembali-judex-juris.ma/, diakses pada tanggal 05 Maret 2020, pukul 11.30 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2015/06/12/1752487/Hamdan.Zoelva.Menambah.Hukuman.Bukan.Kompetensi.MA>, diakses pada tanggal 06 Maret 2020, pukul 07.58 WIB.

